

CURRICULUM VITAE

- 1. Nama** : Prof Dr Ir Hariadi Kartodihardjo, MS
- 2. Tempat /Tanggal Lahir** : Jombang, 24 April 1958
- 3. NIP** : 195804241983031005
- 4. NPWP** : 05.900.163.6-404.000
- 5. Staf Pengajar IPB pada**
- Fakultas** : Kehutanan
- Jurusan** : Manajemen Hutan
- Lab** : Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan
- 6. Alamat Kantor** : Departemen Manajemen Hutan,
Fakultas Kehutanan,
Institut Pertanian Bogor. PO Box 168.
Kampus IPB Darmaga. Bogor 16001.
Telp. 0251. 621677, 621295, 421355
- Rumah** : Jl Cifor No. 195, Bubulak, Bogor Barat
Bogor. HP. 0811193383
Email : hakabgr@gmail.com

7. Bidang Keahlian (ilmu yang ditekuni)

- Keahlian Utama : Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam
- Keahlian Kedua : Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Alam (SDA)

8. Riwayat Pendidikan:

- S1** Institut Pertanian Bogor
Jurusan Teknologi Hasil Hutan/Fakultas Kehutanan
1981
- Skripsi : Efisiensi Penggunaan Dapur Arang Model Thailand,
Malaysia dan Lokal di Tanjung Pinang, Riau
- S2** Institut Pertanian Bogor
Ilmu Pengetahuan Kehutanan, 1989
- Tesis : Optimasi Produksi Kayu Jati di Industri Pengolahan Kayu
Jati Cepu, Perum Perhutani Unit I, Jawa Tengah.
- S3** Institut Pertanian Bogor
Ilmu Pengetahuan Kehutanan, 1998
- Disertasi : Peningkatan Kinerja Pengusahaan Hutan Alam Produksi
Melalui Penataan Kelembagaan

9. Pengalaman Kerja

a. Mengajar

(1). Di Departemen Manajemen Hutan-Fahutan IPB

Mata Kuliah S1

1. Analisis Kebijakan Kehutanan (MNH 221)

Mata Kuliah S2/S3

1. Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan (S3; MNH 722)
2. Politik Kehutanan (S2/S3: MNH 621)
3. Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam (S2/S3; MNH 522)
4. Kebijakan Pembangunan Kehutanan (S3; MNH 721)

(2). Di Departemen Lainnya di IPB

Mata Kuliah S2/S3

1. Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam (S2/S3; PSL 621)
2. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (S3; TSL 730)
3. Teori Ekologi Politik dan Gerakan Ekologi (S2/S3; FEMA 645)
4. Pengelolaan Konflik Sosial dan Kelembagaan PSDAL (PSL 722)

(4). Di Universitas lain (Universitas Indonesia)

Mata Kuliah S2/S3

1. Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam (ANT 81055)

b. Pengalaman Kerja Lainnya

Tahun 2019/2020

Sebagai narasumber kajian kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi dan United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) mengenai Corruption Risk Assesment Kayu Komersial di Kalimantan Timur.

Tahun 2019/2020

Sebagai Tenaga Ahli Kajian Perum Perhutani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tahun 2019/2020

Ketua Tim Panel Penilai Penghargaan Nirwasita Tantra Tahun 2019. SK Menteri LHK No. 329/MENLHK//SETJEN/DTN.0/5/2019 tanggal 9 Mei 2019.

Tahun 2019/2020

Sebagai penasehat senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Kebijakan Tatakelola (*governance*) dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam. SK Menteri LHK No. 56/Menlhk/Setjen/PEG.2/1/2019, tanggal 17 Jan. 2019.

Tahun 2018/2019

Melakukan *public review* terhadap rencana peraturan daerah RTRWP Riau 2017—2037 dan sebagai anggota penyusun untuk gugatan ke Mahkamah Agung terhadap Perda Tata Ruang Riau no 10 tahun 2018

Tahun 2018/2019

Sebagai Ketua Tim Panel Wawancara KLHK dengan Ketua DPRD. SK MenLHK No. 425/MenLHK/Setjen/DTN.0/9/2018.

Tahun 2018/2019

Sebagai Ketua Tim Panel Penilai Penghargaan Nirwasita Tantra (Green leadership) untuk Bupati, Walikota dan Gubernur. SK MenLHK No. 98/MenLHK/Setjen/DTN.02/2/2018.

Tahun 2018/2019

- Sebagai penasehat senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Kebijakan Tatakelola (*governance*) dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam. SK Menteri LHK No. 722/Menlhk/Setjen/PEG.2/12/2017, tanggal 29 Des. 2017.
- Tahun 2017/2018
Sebagai narasumber Kegiatan Implementasi Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan dan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (GNP-SDA) Indonesia Tahun 2017. SK Pimpinan KPK-RI No KEP 003/10-15/02/2017.
- Tahun 2017/2018
Sebagai anggota tim Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Tatakelola (*governance*) Sumberdaya Alam untuk Tindak Lanjut Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) dalam rangka Pengendalian Perubahan Iklim. SK MenLHK No. 97/MenLHK/Setjen/PPI.0/2/2017.
- Tahun 2017/2018
Sebagai Ketua Tim Panel Penilai Penghargaan Nirwasita Tantra. SK MenLHK No. 226/MenLHK/Setjen/SET.0/5/2017
- Tahun 2016/2017
Sebagai anggota tim Panel Pakar Penguji Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pegunungan Kendeng. SK Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia No 9/2016.
- Tahun 2016/2017
Sebagai anggota tim Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo Propinsi Riau. SK Sekjen MenLHK No. 5137/MenLHK-Setjen/Rokum/HPL.1/10/2016.
- Tahun 2016/2017
Sebagai Tim Penghubung dalam Tim Operasional Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo Propinsi Riau. SK Sekjen MenLHK No. 4271/MenLHK-Setjen/Rokum/HPL.1/9/2016.
- Tahun 2016/2017
Sebagai anggota tim penilai laporan status lingkungan hidup daerah. SK MenLHK No. 237/MenLHK/Setjen/OTL.0/3/2016.
- Tahun 2016/2017
Sebagai anggota tim Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang tatakelola (*governance*) untuk Tindak Lanjut Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) dalam rangka Pengendalian Perubahan Iklim. SK MenLHK No. 165/MenLHK/PPI/ PPI.1/2/2016.
- Tahun 2016/2017
Sebagai narasumber pelaksanaan program Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (GNSDA) yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SK Pimpinan KPK-RI No KEP 194/01-15/02/2016.
- Tahun 2016/2017
Sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim. Keputusan Menlhk No. 487/MenLHK/Setjen/OTL.0/6/2016.
- Tahun 2011/2016
Sebagai anggota dan ketua Dewan Kehutanan Nasional Periode 2011–2016. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 390/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016.
- Tahun 2015/2016
Sebagai anggota tim percepatan penyelesaian penyusunan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup. SK MenLHK No 2 Tahun 2015.
- Tahun 2015/2016
Sebagai anggota tim evaluasi perizinan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Tahun 2014/2015
Sebagai anggota komisioner Inkuiri Nasional pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bagi penyelesaian konflik masyarakat adat dan pemerintah terkait penguasaan hutan negara.

- Tahun 2014-2016
Koordinator pelaksanaan kajian penyempurnaan ukuran kinerja BUMN Kehutanan, resolusi konflik hutan dan lahan di Jawa, serta perbaikan sistem produksi dan pemasaran Perum Perhutani. Penelitian sebagai pelaksanaan program Penelitian dan Pengembangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan agenda perbaikan kebijakan Kementerian/Lembaga.
- Tahun 2014/2015
Penasehat Senior Badan Pengelola REDD+ (BPREDD+)
- Tahun 2014/2015
Koordinator penulis buku KPH Jilid 2: "Strategi Pembangunan KPH dan Perubahan Struktural Kehutanan Indonesia". Direktorat Jenderal Planologi, Kementerian Kehutanan
- Tahun 2013 – Desember 2015
Nara Sumber Perubahan Kebijakan Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan dalam Nota Kesepakatan Bersama (NKB) 12 Kementerian/Lembaga yang dikoordinasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Tahun 2013-2014
Ketua Tim Kajian Tata Kelola Perizinan di Bidang Kehutanan, penelitian sebagai pelaksanaan program Penelitian dan Pengembangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan agenda perbaikan kebijakan Kementerian/Lembaga. Kegiatan ini mencakup pelaksanaan perubahan kebijakan perizinan dan kawasan hutan di Kementerian Kehutanan.
- Tahun 2006 – 2016
Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional (DKN), 2006/2007; 2007/2008; 2011/2012; 2012/2013. Anggota Presidium DKN, 2006—2016.
- Tahun 2012 – 2015
Anggota Dewan Pertimbangan Kalpataru
- Tahun 2012 – 2015
Anggota Dewan Penasehat Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia (APHI)
- Tahun 2003 – 2016
Anggota Dewan Pembina Yayasan Kehati 2011-2015. Sekretaris Dewan Pengurus Yayasan Keanekaragaman Hayati (Kehati) di Jakarta, 2003-2006. Ketua Dewan Pengurus Kehati, Februari 2006 – 2011.
- Tahun 2012 – 2013
Anggota Tim Asistensi Pengembangan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SK MenLH No 55/2012)
- Tahun 2011 – 2012
Dewan pakar satuan tugas pengurangan emisi dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan (Satgas REED+) di Provinsi Riau
- Tahun 2011 – 2012
Ketua Tim kajian dan penulis Rencana Aksi Nasional pelaksanaan Strategi Nasional REDD+.
- Tahun 2011 – 2014
Ketua Tim kajian penetapan indikator *Participatory Governance Assesment* (PGA) untuk REDD+ dengan pendanaan UNDP (2011-2012). Anggota Panel Ahli penetapan indeks PGA tahun 2013 (2013-2014).
- Tahun 2010 – 2011
Sebagai Ketua Kelompok Kerja Persiapan Pertemuan Tingkat Menteri tentang Pemberantasan Mafia Hukum dalam rangka Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Hutan (Kpts MenHut R.I. No. 478/Menhut-II/2010, Tanggal 20 Agustus 2010)
- Tahun 2010 – 2012
Anggota Tim Penulis Strategi Nasional (Stranas) REDD+ yang bertanggung-jawab kepada Satgas REDD+
- Tahun 2009 – 2011
Anggota Kelompok Kerja Kebijakan Pembangunan Kehutanan, Kementerian Kehutanan Jakarta.

Tahun 2003 – 2012

Sekretaris Jenderal FOReTIKA (Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia), Juli 2003 sampai Desember 2012.

Tahun 2004 – 2008

Ketua Majelis Perwalian Anggota (MPA), Lembaga Ekolabel Indonesia.

10. Penelitian:

SUMBER DANA	PERAN	TAHUN	JUDUL/Laporan Penelitian
UNODC	Tim Ahli	2019	Analisis Corruption Risk Assesment Kayu Komersial di Kalimantan Timur
Badan Restorasi Gambut	Ketua Tim	2018	Analisis dan Strategi Penguatan Kebijakan Pengelolaan Gambut
Kemitraan	Konsultan Senior Advisor	2018	Menuju Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon dan Narasi Alternatif bagi Pembangunan
RMI Bogor	Nara Sumber Tim	2018	Analisis Sebelum dan Sesudah Pengakuan Hak Masyarakat Adat atas Hutan Adat di Indonesia
The Asia Foundation	Tim Tata Kelola	2017	Kajian Kebijakan dan Tata Kelola Perkebunan Sawit
Kemitraan untuk Litbang KPK	Koordinator Tim	2016	Kajian Biaya Produksi Pengusahaan Hutan Alam dan Kebijakan Perizinan Kehutanan
Kemitraan untuk Litbang KPK	Koordinator Tim	2015	Kajian Identifikasi Masalah dan Perbaikan Sistem PNPB Kehutanan
Transparency Internasional Indonesia	Koordinator Tim	2014	Kajian kesiapan daerah dalam penanggulangan korupsi dalam pelaksanaan REDD+
Litbang KPK	Koordinator Tim	2014-2016	Kajian sistem produksi, pemasaran, penilaian kinerja dan resolusi konflik dalam wilayah usaha Perum Perhutani
UNDP	Panel Ahli	2014	Tata Kelola (Governance) Nasional Hutan dan Lahan Tahun 2013 dalam Pelaksanaan REDD+
Komisi Pemberantasan Korupsi	Ketua Tim	2013	Kajian Sistem Perizinan di Sektor Sumberdaya Alam: Studi Kasus Sektor Kehutanan
UNDP	Ketua Tim	2012-2013	Tata Kelola (Governance) Nasional Hutan dan Lahan Tahun 2012 dalam Pelaksanaan REDD+
Perum Perhutani	Ketua Tim	2013	Posisi Perhutani dalam Problema Sosial dan Lingkungan Hidup di P Jawa
Litbang Kehutanan	Anggota Tim	2011	Tata Kepemerintahan Pembangunan Kehutanan (II)
Litbang Kehutanan	Anggota Tim	2011	Analisis Proses Penetapan Kebijakan Kehutanan
MFP2-PSP IPB	Anggota Tim	2011	Integrasi Ssistem Verifikasi Legalitas Kayu kedalam Kebijakan REDD

SUMBER DANA	PERAN	TAHUN	JUDUL/Laporan Penelitian
MFP2-Foretika	Ketua Tim	2011	Analisis Kebijakan Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
CIFOR	Penelitian Mandiri	2008-2010	Analisis Kebijakan Pengelolaan Hutan terkait Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan.
SMCP-GTZ	Penelitian Mandiri	2009	Identifikasi Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
SMCP-GTZ	Penelitian Mandiri	2008	Kerangka Hubungan Kerja Sebelum dan Setelah adanya KPH: Upaya Peningkatan Investasi dan Peningkatan Intensitas Pengelolaan Hutan

11. Publikasi

a. Buku/B, Majalah/M, Koran/K, Jurnal/J

PENERBIT	TAHUN	JUDUL
JPIK	2019/M	Korupsi Sumberdaya Alam dalam Bayang-Bayang Pelemahan KPK
Majalah TEMPO	2019/M	Pemutihan Lahan dalam RUU Pertanahan
Majalah Rimba Indonesia	2019/M	Dua Belas Modal Pengelolaan Hutan Secara Lestari
Harian KOMPAS	2019/K	20 Tahun Undang-Undang Kehutanan
Majalah TEMPO	2019/M	Rahasia Data Sawit dan Masyarakat Konspiratif
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia	2019/J	Mengatasi Persoalan Institusional PSDA: Pembelajaran dari Kasus Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo di Propinsi Riau
Harian KOMPAS	2019/K	Pengelolaan Krisis Ekosistem
Harian TEMPO	2019/K	Ketika Mahasiswa sebagai Konsumen
Forest Watch Indonesia	2018/B	Merangkai Stanza Lagu Kebangsaan: 73 Esai-Esai Reflektif dalam Kuasa Pengetahuan, Politik SDA dan Problematika Kebijakan
PRISMA, LP3ES Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi	2018/J	Lingkaran Korupsi Sumberdaya Alam. Vol 37. No 3/2018 p 113—122
Harian KOMPAS	2018/K	Lingkungan Hidup dalam Kesadaran Diri
The Asia Foundation dan FORCI Development	2018/B	Tata Kelola Perkebunan Sawit di Indonesia (Anggota Tim Penulis)
Harian KOMPAS	2018/K	Pilkada dan Korupsi SDA
Majalah Forest Digest	2018/M	Telaah Best Practices dan Trans-Disiplin Kelestarian
Harian Koran TEMPO	2018/K	Selamatkan Tanah Reforma Agraria

PENERBIT	TAHUN	JUDUL
Agro Indonesia	2017/K	Power Perbaikan untuk Perhutani: Pelajaran dari pendampingan Tim KPK
AgroIndonesia	2017/K	Titik Kritis Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
Majalah Ekonomi Hijau	2017/M	Melepas Selimut Permasalahan Tenurial
Majalah Ekonomi Hijau	2017/M	Persoalan Politis Hutan—Lahan
PSA-IPB, RMI, Auriga, P4W-IPB, SAINS	2017/B	Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam: Diskursus—Politik—Aktor—Jaringan
LP3ES dan Yayasan KEHATI	2017/B	Di Balik Krisis Ekosistem: Pemikiran tentang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Harian TEMPO	2017/K	Korupsi Kronis dalam Institusi Ekstra Legal
Harian KOMPAS	2017/K	Menghadirkan Negara dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam
Majalah Rimba Indonesia	2016/M	Pelestarian Hutan, Korupsi, dan Peran Rimbawan
Harian KOMPAS	2016/K	Negara dan Sumber Daya Alam
Majalah Rimba Indonesia	2016/M	Merdeka dari Bangsa Sendiri: Melawan <i>state capture</i> dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam
Jurnal Manajemen Hutan Tropika	2015/J	Transaction Cost of Forest Utilization Licences: Institutional Issues
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2014/B	Strategi Pembangunan KPH dan Perubahan Struktur Kehutanan Indonesia
Majalah Hutan Indonesia	2014/M	Melepas Biaya Tinggi Transaksi di Kehutanan
Jurnal Manajemen Hutan Tropika	2013/J	Challenges for Interdisciplinary Use in Forest Management: Prompts of Coalition of Forest Management, Economic and Institutional Sciences
Majalah Elaeis Indonesia	2013/M	Moratorium Izin dalam Politik Public-Private
Jurnal Manajemen Hutan Tropika	2013/J	Development of Small Holder Plantation Forests: An Analysis from Policy Process Perspective
FORCI-Tanah Air Beta	2013/B	Kembali ke Jalan Lurus: Kritik Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia
Jurnal Wacana	2011/J	Perusahaan Hutan dan Ilusi Kelimpahan: Kasus Perum Perhutani
Agro Indonesia	2010/K	Politik Letter of Intent Indonesia – Norwegia
Balai Besar Penelitian Dipterokarpa, Samarinda.	2009/J	Esei Persoalan Kebijakan Penetapan Sistem Silvikultur: Telaah kelemahannya sebagai <i>secondary rules</i>
Majalah Duta Rimba, Perhutani	2009/M	Masalah Menentukan Masalah
Majalah PERSAKI	2009/M	Diskursus Menanam Pohon, 1946-2008
Majalah Duta Rimba, Perhutani	2009/M	Collective Action Upaya Peningkatan Efisiensi Perhutani

PENERBIT	TAHUN	JUDUL
Wana Aksara	2008/B	Dibalik Kerusakan Hutan dan Bencana Alam: Masalah Transformasi Kebijakan Kehutanan
Kompas (Jawa Barat)	2008/K	Menyoal Kelembagaan Kehutanan Jawa Barat
Jurnal Kebijakan Kehutanan	2006/J	Masalah Kelembagaan dan Arah Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Yayasan Kehati	2007/B	Dibalik Kerusakan Hutan dan Bencana Alam: Masalah Transformasi Kebijakan Kehutanan
Jurnal Manajemen Hutan Tropika	2006/J	Masalah Kapasitas Kelembagaan dan Arah Kebijakan Kehutanan: Studi Tiga Kasus
Ideals	2006/B	Ekonomi dan Institusi Pengelolaan Hutan
Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan IPB	2006/B	Refleksi Kerangka Pikir Rimbawan: Menguak Masalah Institusi dan Politik Pengelolaan Sumberdaya Hutan
Duta Rimba	2006/M	Perum Perhutani: Yang Disayang Sekaligus Disayangkan
Harian Kompas	2006/K 14 Jan	Di Balik Masalah Penganggulan Bencana
Equinox	2006/B	Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia

b. Seminar/Lokakarya/Workshop

PELAKSANA	PERAN	TAHUN	TEMA/ JUDUL
Sylva Indonesia	Pembicara	2019/Bogor	Kebijakan, Diskursus dan Ekonomi Politik Kawasan Hutan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UGM	Pembicara	2019/Yogyakarta	Korupsi dan Masalah Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Alam
Asosiasi Profesor Indonesia	Pembicara	2019/Bogor	Korupsi Sumberdaya Alam
Universitas Mataram	Pembicara	2019/Mataram	Transformasi Kebijakan Kehutanan
FWI-UNPATTI	Pembicara	2019/Ambon	Politik dan Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam
Sylva Indonesia	Pembicara	2019/Samarinda	Pengelolaan Hutan dalam Penerapan Teori Kritis
FWI—UNIPA	Pembicara	2019/Manokwari	Tinjauan PSDA di Papua Barat dari Buku Merangkai Stanza Lagu Kebangsaan.
CSF-Jakarta	Pembicara	2018/Sintang	Tinjauan Kebijakan dan Isu Lanskap Strategis
Komisi Pemberantasan Korupsi	Pembicara	2018/Jakarta	Mekanisme Kerja Komite Advokasi Nasional bagi Pencegahan Korupsi Pelaku Usaha Kehutanan

PELAKSANA	PERAN	TAHUN	TEMA/JUDUL
Forest Watch Indonesia	Pembicara	2018/Jakarta	Persoalan Birokrasi—Politik Pengembangan KPH
Jikalahari, Pekanbaru	Pembicara	2018/Pekanbaru	Evaluasi Kebijakan Kehutanan 2014—2017
Sawit Watch	Pembicara	2018/Bogor	Politik Moratorium Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pembicara	2018/Jakarta	Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial
KSPPM-Medan	Pembicara	2018/Parapat	Politik dan Tata Kelola Sumberdaya Alam
Sayogyo Institute	Pembicara	2018/Bogor	Riset Kebijakan dan Daya Adopsinya
Ombudsman RI	Pembicara	2018/Palu	Masalah dan Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pembicara	2018/Bogor	Tinjauan Kebijakan dan Tata Kelola PSDA terhadap Penyediaan TORA dari Kawasan Hutan Negara
Program Studi Pembangunan, USU	Pembicara	2018/Medan	Kebijakan dan Politik Pengelolaan Sumberdaya Alam
Forest Watch Indonesia	Pembicara	2018/Bogor	Soal Tata Kelola PSDA: Narasi Kisah-Kisah Nyata dalam Pelaksanaan GNPSDA—KPK 2012-2017
Koalisi LSM Banda Aceh	Pembicara	2018/Banda Aceh	Tata Kelola dan Politik Pengelolaan Sumberdaya Alam
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pembicara	2018/Jakarta	Institusi Pseudo—Legal Korupsi Pelepasan Kawasan Hutan
Fakultas Pertanian, UNILA	Pembicara	2018/Bandar Lampung	Menakar Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Indonesia
Forest Watch Indonesia	Pembicara	2018/Bogor	Tata Kelola Perizinan Kehutanan
Badan Keahlian, DPR-RI	Pembicara	2017/Jakarta	Evaluasi Pelaksanaan UU No 18/2013 tentang Pencegahan Perusakan Pengelolaan Hutan
Fakultas Pertanian UNILA	Pembicara	2017/Jakarta	Evaluasi Pelaksanaan UU No 18/2013 tentang Pencegahan Perusakan Pengelolaan Hutan
Indonesia Corruption Watch	Pembicara	2017/Jakarta	Evaluasi Pelaksanaan GNPSDA yang dikoordinasikan oleh KPK
Badan Keahlian, DPR-RI	Pembicara	2017/Jakarta	Kerangka Perubahan UU No 41/1999 tentang Kehutanan
Indonesia Corruption Watch	Pembicara	2016/Jakarta	Tinjauan Kritis Upaya Penegakkan Hukum di Sektor Kehutanan

PELAKSANA	PERAN	TAHUN	TEMA/JUDUL
Jikalahari	Pembicara	2016/Pekanbaru	Partisipasi Publik dalam Mencegah dan Menanggulangi Kerhutla di Riau
Deputi Bidang Pencegahan KPK	Pembicara	2016/Jakarta	Pembangunan Integritas Praktek Bisnis di Kehutanan
HUMA	Pembicara	2016/Jakarta	Membahas Masa Depan Hutan Adat di Indonesia
Kementerian Keuangan	Pembicara	2015/Yogyakarta	Masalah dan Kebijakan Penarikan PNBP sektor Kehutanan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pembicara	2015/Makassar	Tata Kelola Hutan dan Lahan dan Pembangunan KPH
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pembicara	2015/Denpasar	Tata Kelola Hutan dan Lahan dan Pembangunan KPH
Badan Lingkungan Hidup Daerah, Prop Bali	Pembicara	2015/Denpasar	Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagai Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan: Indeks dan Implikasi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pembicara	2014/Bogor	Perubahan PP No 6/2007 jo PP No 3/2008 bagi Peningkatan Tata Kelola Hutan dan Lahan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Anggota Komisioner Inkuiri Nasional	2014/Palu, Medan, Pontianak, Mataram, Lebak, Ambon, Jayapura	Dialog Publik dan Dengar Keterangan Umum Masyarakat Hukum adat
Dewan Kehutanan Nasional	Pembicara	2014/Biak	Isu-isu Nasional Kehutanan—Tata Kelola, Korupsi dan KPH: Agenda bagi Kamar Masyarakat
Sekretariat Nasional Jaringan Komunitas dan Warga Negara Indonesia	Pembicara	2014/Jakarta	Reforma Agraria dan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UKP4-Tim Khusus REDD+	Pembicara	2013/Jakarta	Penjabaran Perpres No 62/2013 Dikaitkan Persoalan Riil REDD+
Biro Perencanaan, Kementerian Kehutanan	Pembicara	2013/Jakarta	Litbang dan Pengembangan SDM Kehutanan dalam Prespektif Institusi dan Politik
Biro Perencanaan, Kementerian Kehutanan	Pembicara	2013/Bogor	Pembahasan dan Pembaharuan Kebijakan Kehutanan: Fokus IUPHHK dan Kawasan Hutan

PELAKSANA	PERAN	TAHUN	TEMA/ JUDUL
Kementerian Lingkungan Hidup	Pembicara	2013/Jakarta	Identifikasi Isu dan Masalah Lingkungan Hidup sebagai Dasar penetapan Rencana Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Ditjen Bina Usaha Kehutanan, Kemenhut	Pembicara	2013/Jakarta	Masalah dan Perbaikan Kinerja Izin Usaha Kehutanan
Dinas Kehutanan Papua	Pembicara	2013/Kerom dan Waropen	Kebijakan dan Pengembangan Kelembagaan KPH
IPB-Burung Indonesia	Pembahas	2013/Bogor	Input bagi Kebijakan Restorasi Ekosistem di Hutan Produksi dan Verifikasi Kinerjanya
Konsorsium Pembaruan Agraria	Pembicara	2013/Jakarta	Refleksi atas Strategi dan Aksi Percepatan Kepastian Tenurial Kehutanan
Yayasan Kemitraan	Pembicara	2012/Jakarta	Tata Kelola Kehutanan Menuju Keadilan Tenurial
Komisi Pemberantasan Korupsi	Pembicara	2012/Jakarta	Masalah dan Kebijakan Pengukuhan dan Penggunaan Kawasan Hutan
Mahkamah Agung	Pembicara	2012/Pekanbaru	Kebijakan dan Perencanaan Tata Ruang dan Kawasan Hutan
Mahkamah Agung	Pembicara	2012/Bogor	Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Indonesian Corruption Watch	Pembicara	2012/Jakarta	Perizinan Kehutanan dan Peluang Terjadinya Korupsi
Program Studi PSL IPB	Pembicara	2012/Bogor	Masalah dan Kebijakan Penyelesaian Konflik Tenurial dan PSDA
Kementerian Koordinator Perekonomian	Pembicara	2012/Jakarta	Masalah dan Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan
Kementerian Lingkungan Hidup	Pembicara	2012/Jakarta	Kebijakan Lingkungan Hidup dalam Kerangka PSDA Berbasis Ekoregion
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Pembicara	2011/Bogor	Masalah dan Kebijakan Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan
UNDP	Pembicara	2011/Jakarta	Penetapan Kriteria dan Indikator <i>Participatory Governance Assessment</i>
Kementerian Kehutanan	Pembicara	2011/Jakarta	Kebijakan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Kementerian Lingkungan Hidup	Pembicara	2011/Solo	Kebijakan Lingkungan Hidup berdasarkan Pendekatan Ekoregion
Kementerian Kehutanan	Pembahas	2011/Jakarta	Kebijakan Pelaksanaan Private-Public Pengelolaan Kawasan Konservasi

PELAKSANA	PERAN	TAHUN	TEMA/ JUDUL
Dinas Kehutanan Propinsi Riau	Pembicara	2011/Pekanbaru	Percepatan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Pembicara	2011/Bogor	Kajian Efektivitas Penelitian dalam Pembuatan Kebijakan
World Agroforestry Center	Pembicara	2011/Bogor	Hubungan Kekuasaan dan REDD: Membongkar Definisi "Hak Karbon" dan Menjawab Pertanyaan Legalitas Kawasan Hutan di Indonesia
Fakultas Kehutanan	Pembahas	2011/Yogyakarta	FGD Kajian Privatisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional	Pembicara	2010/Yogyakarta	Sektoralisasi Agraria di Sektor Kehutanan
Kementerian Kehutanan dan Dewan Kehutanan Nasional	Pembicara	2010/Jakarta	Masalah Konflik Tata Ruang dan Kebijakan Penyelesaiannya
Kementerian Kehutanan	Pembicara	2010/Jakarta	Masalah Konflik Kawasan Hutan dan Lahan terkait Perubahan Iklim
Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas)	Pembicara	2010/ Jakarta	Pengelolaan hutan bagi penurunan emisi karbon dan menjaga kelestarian lingkungan hidup
Dewan Perwakilan Rakyat	Pembicara	2010/ Jakarta	Akar Masalah Pembalakan Liar: Input bagi Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar

Bogor, Desember 2019



Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS